

## Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Perkotaan

Muhammad Hikmal<sup>1\*</sup>, Ihyani Malik<sup>2</sup>, Nur Wahid<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*Increased numbers of beggars and homeless people can lead to a decline in the quality of life in urban areas, as well as increased social tensions and inequality. This situation can also lead to social stigmatisation of this vulnerable group, which then worsens their condition and complicates efforts to reintegrate into society. The purpose of this research is to analyse the role of the Pinrang Regency government in handling vagrants and beggars. The type of research used is a qualitative approach with a qualitative description research type. The results showed that the Social Service and Satpol PP collaborated in handling vagrants and beggars in Pinrang Regency. However, the findings are that the cooperation has not been effective. The results of the research conducted revealed that the role of the Social Service in handling vagrants and beggars in Pinrang Regency still has not reached the expected level of effectiveness. Although planning has been carried out by Satpol PP and the Social Service of Pinrang Regency, the results obtained do not meet expectations.*

**Keywords:** cross-sector collaboration, homelessness and begging, public policy

### Abstrak

Meningkatnya jumlah pengemis dan gelandangan dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup di daerah perkotaan, serta meningkatnya ketegangan sosial dan ketidaksetaraan. Situasi ini juga dapat menyebabkan stigma sosial terhadap kelompok yang rentan ini, yang kemudian memperburuk kondisi mereka dan mempersulit upaya untuk reintegrasi ke masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran pemerintah Kabupaten Pinrang dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial dan Satpol PP bekerjasama dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pinrang. Namun, temuan yang ada kerjasama tersebut belum efektif. Hasil penelitian yang dilakukan terungkap bahwa peran Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pinrang masih belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Meskipun telah dilakukan perencanaan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang, hasil yang diperoleh tidak memenuhi ekspektasi.

**Kata kunci:** gelandangan dan pengemis, kebijakan publik, kolaborasi lintas sektor

---

\* hikmal2@gmail.com

## PENDAHULUAN

Hingga saat ini, pemerintah telah berusaha menangani masalah gelandangan dan pengemis, namun seringkali penanganannya tidak tepat, yang mengakibatkan permasalahan sosial terkait terus berlanjut bahkan semakin memburuk (Hamidah, 2019). Oleh karena itu, pendekatan yang lebih baik dalam penanganan gelandangan dan pengemis adalah mengarahkan mereka menuju pemahaman tentang norma-norma umum yang berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih normal.

Permasalahan gelandangan dan pengemis bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah di kota-kota besar, melainkan juga menjadi perhatian pemerintah daerah di kota-kota kecil yang harus menghadapi tantangan menangani masalah gelandangan dan pengemis di jalan-jalan, yang disebabkan oleh tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial (Khan & Fahad, 2020). Aktivitas mengemis seringkali dipicu oleh masalah ekonomi yang mendesak. Karena tekanan kebutuhan ekonomi yang tinggi, masyarakat terpaksa mencari solusi, bahkan jika itu berarti mereka harus menjadi pengemis

(Zamharira & Arantika, 2018). Salah satu contoh daerah di Sulawesi Selatan yang menghadapi masalah serupa adalah Ibukota Kabupaten Pinrang. Di Ibukota Kabupaten Pinrang, jumlah pengemis terus bertambah dari waktu ke waktu. Mereka dapat ditemukan di berbagai tempat seperti persimpangan lampu lalu lintas, warung kopi, terminal, pusat perbelanjaan, dan area yang ramai lainnya. Secara fisik, gelandangan dan pengemis berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, tetapi sebenarnya mereka terisolasi karena terbatasnya akses mereka terhadap fasilitas yang ada. Banyak dari mereka yang sebenarnya masih dalam keadaan sehat, namun mereka memilih untuk menjadi gelandangan dan pengemis karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, kurangnya pendidikan dan keterampilan, serta arus urbanisasi.

Kurangnya keterampilan di kalangan penduduk perkotaan dan persaingan yang sengit telah mendorong sebagian dari mereka untuk akhirnya memilih menjadi pengemis dan gelandangan di Ibukota Kabupaten Pinrang. Gelandangan dan pengemis dengan mudah dapat ditemui di berbagai lokasi di daerah ini, seperti pusat perbelanjaan seperti Mall Of Pinrang Sejahtera, area parkir umum,

pasar, bahkan di depan pintu minimarket-minimarket sekalipun. Masyarakat merasa khawatir terhadap perilaku beberapa gelandangan pengemis, yang terkadang bersikeras dan sulit pergi jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, meskipun tidak diberi uang. Dampak dari peningkatan jumlah gelandangan pengemis ini mencakup ketidaktaatan sosial, ketidaknyamanan, ketidakdisiplinan, dan gangguan terhadap estetika kota.

Adapun kebijakan pemerintah Ibukota Kabupaten Pinrang melalui dinas sosial dan Satpol PP Melakukan penertiban Gelandangan dan Pengemis di Beberapa wilayah di Ibukota Kabupaten Pinrang, Gelandangan dan Pengemis yang terjaring akan diberikan langkah persuasif dengan menelusuri keberadaan dan mengembalikan kepada keluarganya untuk dibina lebih lanjut. Selain itu pihak dinas sosial dan satpol PP juga melibatkan pihak kementerian agama kabupaten Pinrang untuk memberikan bimbingan keagamaan kepada mereka sebelum dikembalikan kepada pihak keluarga.

Adapun peran Pemerintah kota, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pinrang, sangatlah penting dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis. Pemerintah daerah memiliki

tanggung jawab untuk memastikan bahwa kondisi sosial masyarakatnya tetap terjaga dengan baik, termasuk dalam upaya mengatasi kemiskinan dan permasalahan sosial yang terkait seperti gelandangan dan pengemis. Mereka memiliki peran dalam menyediakan dukungan kebijakan, sumber daya, dan koordinasi antarinstansi untuk penanganan masalah ini. Dinas Sosial Kabupaten Pinrang memiliki peran khusus dalam menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial. Dinas ini berperan sebagai pelaksana program, mengidentifikasi individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan, menyusun program-program rehabilitasi sosial, dan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas program-program yang telah diimplementasikan. Untuk itu pemerintah khususnya Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang perlu memperhatikan penanganan bagi mereka yang memiliki kehidupan yang kurang layak khususnya Gelandangan dan Pengemis yang masih berkeliaran di Ibukota Kabupaten Pinrang.

Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam tentang peran Dinas Sosial dan kerjasama dengan

pemerintah kota sangat penting untuk memastikan bahwa upaya penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pinrang dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Penelitian ini akan menggali secara lebih mendalam peran Dinas Sosial dan mengidentifikasi kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang upaya penanganan masalah sosial ini dan memberikan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan dalam hal ini.

Dalam konteks penelitian ini, analisis yang mendalam tentang peran Dinas Sosial akan membantu dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah ini. Pemahaman yang lebih baik tentang peran dan kebijakan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menjalankan tugasnya juga akan membantu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pinrang. Dengan memahami peran Dinas Sosial dalam konteks Kabupaten Pinrang yang khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan

lainnya dalam meningkatkan upaya penanganan masalah gelandangan dan pengemis. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi penting dalam literatur mengenai penanganan masalah sosial di tingkat lokal, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sosial di masyarakat Indonesia pada umumnya.

Mengenai kemiskinan tidak lepas dari suatu permasalahan kesejahteraan, diantaranya dari pengukuran kemiskinan itu sendiri. Rahadi et al., (2014), menjelaskan bahwa kesejahteraan menjadi antitesis dari kemiskinan yang dialami oleh seseorang. Kaitannya kesejahteraan dengan kemiskinan juga tercermin dari pengukuran kesejahteraan menggunakan garis kemiskinan yaitu dengan standar USD \$1 atau USD \$2 perkapita perhari. Semakin besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka akan mencerminkan semakin rendah taraf kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Menurut Kurniawan, (2022) pengertian kesejahteraan umum mengacu pada teori utilitarianisme yang bahwa kebenaran adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang. Therborn, (2020) menyatakan kesejahteraan akan tercapai

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>

apabila tercipta situasi optimal. Situasi optimal terjadi apabila tidak ada individu dapat berbuat lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk, di samping itu, pengalokasian sumber daya dikatakan efisien bila kondisi yang dicapai tidak bisa dicapai lebih baik lagi. Kemiskinan menunjuk situasi pada kekurangan yang nyata dalam kesejahteraan (Bradshaw & Nieuwenhuis, 2021; Rusliadi et al., 2024). Karena itu masalah kemiskinan selalu dikaitkan dengan kesejahteraan. Untuk menilai taraf kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara harus dilakukan pengukuran kesejahteraan (Mulia & Saputra, 2020).

Pada tataran global terjadi perdebatan mengenai indikator pengukuran atas kesejahteraan mewakili dua kubu dengan pandangan pembangunan yang berbeda. Kubu pertama menilai kesejahteraan harus diukur dari PDB dan pendapatan perkapita. Kubu kedua memandang kesejahteraan harus dilihat dari pembangunan manusia (Juarez, 2020). Tetapi Sen dan Ul Haq, menolak PDB sebagai pengukuran kesejahteraan yang dilakukan dengan merancang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memuat tiga hal yakni pendapatan perkapita, usia harapan hidup, dan angka partisipasi sekolah sebagai alternatif

untuk melihat kesejahteraan. Indeks pembangunan manusia memuat pemikiran bahwa rakyat merupakan kekayaan sebenar-benarnya dari sebuah negara dan pembangunan harus membuat lingkungan yang memungkinkan penghuninya untuk menikmati hidup panjang, sehat, dan berdaya cipta (Dasic et al., 2020). Asal kesejahteraannya individu adalah kemampuan untuk bisa berfungsi dengan layak dalam masyarakat (Ruggeri et al., 2020). Kondisi kesejahteraan yang dimaksud adalah saat terpenuhinya kebutuhan dasar akan gizi, pendidikan, perumahan, penghasilan, kebebasan dalam memilih, dan mendapat perlindungan dari risiko yang mengancam hidup seseorang.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa terdapat perbedaan pendapat antar dua pihak mengenai pengukuran kesejahteraan. Di satu pihak kesejahteraan hanya dinilai dari aspek ekonomi semata, dan di pihak kedua ada yang berpendapat bahwa kesejahteraan diukur tidak hanya dengan yang berkaitan dengan masalah ekonomi saja, tetapi juga berkaitan dengan hal lain seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini mempunyai kaitan dengan adanya gepeng, di mana gepeng belum bisa memenuhi kebutuhan dasar akan gizi, pendidikan, perumahan, dan

penghasilan yang tetap. Dalam hal tersebut akan membuat seseorang akan terus mengemis apabila tidak adanya kesejahteraan.

Berbagai pengertian mengenai kemiskinan, masing-masing ahli melukiskan masalah kemiskinan secara berbeda. Hal ini diikuti dengan beragamnya pendekatan yang digunakan oleh para ahli dalam memahami kemiskinan. Kemiskinan sebagai kekurangan bahan dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai hidup layak (Hahury et al., 2022). Kemiskinan merupakan sebuah ketidakmampuan untuk mendapat barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas (Singh & Chudasama, 2020). Kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan keadaan ekonomi masyarakat itu sendiri. Kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi di mana masyarakat berada pada tingkat ekonomi yang lemah, dan ditambah kebijakan pemerintah yang sifatnya jangka pendek, sehingga belum dapat menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat miskin (Morris et al., 2020).

Sarbaini, (2016) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam

bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan tenaga kerja. Pelaksanaan tugas-tugas, Dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial. Pekerja sosial adalah Petugas Khusus dari Departemen Sosial yang mempunyai keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas melaksanakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada lingkungan Departemen Sosial dan Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Instansi lainnya (pasal 1 Keputusan Menteri Sosial No. 4 tahun 1988).

Oleh karena itu, adapun tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis peran pemerintah yang ada di Kabupaten Pinrang dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis. Adapun pertanyaan penelitiannya ialah bagaimana peran pemerintah dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pinrang?

Penelitian ini berkontribusi bagi pemerintah dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan melibatkan beberapa unsur pemerintah dan swasta dapat mempercepat mengatasi masalah

pengemis dan gelandangan yang ada di perkotaan.

## METODE

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pinrang. Adapun alasan penelitian ini karena ingin menganalisis peran Dinas Sosial dan Satpol PP dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Ibukota Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini cenderung menggunakan analisis (Patton, 2009).

Tipe penelitian yang digunakan tipe penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu cara memahami semua permasalahan yang sedang terjadi dengan data dan menggunakan metode wawancara, pengamatan langsung dan dokumentasi. Adapun tujuan penelitian deskriptif kualitatif ini ialah guna membuat uraian akurat mengenai fakta-fakta lapangan.

Untuk memperoleh data yang relevan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Observasi (pengamatan), Wawancara, Dokumentasi (Rahardjo, 2011).

Menurut Sugiyono, (2018) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus hingga tuntas. Hal-hal yang dilakukan dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan menjadi faktor krusial di balik keberadaan gelandangan dan pengemis (Azrin & Bukido, 2020). Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kurangnya kondisi ekonomi, tetapi juga terkait dengan aspek mental dan keterampilan individu. Kemiskinan bisa mengubah pola pikir seseorang untuk memilih jalur mengemis, seringkali disertai dengan kurangnya pendidikan dan keahlian (Wahyuni et al., 2021). Timbulnya gepeng di Kabupaten Pinrang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; faktor natural merupakan suatu masalah usia yang sudah lanjut yang membuat seseorang tidak mampu memperjuangkan hidupnya. Faktor kultural adalah suatu masalah dari kebiasaan seseorang atau penyakit malas berkerja, sehingga menjadi gepeng akan mudah baginya.

Kenaikan jumlah gelandangan dan pengemis di ibukota Kabupaten Pinrang memiliki konsekuensi yang merugikan bagi masyarakat, yang mungkin mempengaruhi beberapa orang untuk bergabung dalam kelompok tersebut. Hal ini didorong oleh pandangan bahwa

menjadi gelandangan dan pengemis bisa menghasilkan uang tanpa perlu modal awal. Dampak negatif lainnya adalah gangguan pada ketertiban umum dan kedamaian lingkungan di Kabupaten Pinrang. Selain itu, aktivitas meminta-minta secara paksa oleh beberapa pengemis dapat merugikan perekonomian masyarakat. Selain itu, banyak gelandangan yang dimanfaatkan oleh orang tua atau orang lain untuk meminta-minta, terutama yang masih di bawah umur. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena dalam jangka panjang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental anak-anak tersebut.

Penanganan masalah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pinrang merupakan tugas yang diemban oleh Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, sesuai dengan mandat lembaga sosial dalam menangani berbagai masalah sosial yang timbul. Meskipun Dinas Sosial telah berupaya dalam menjalankan tugasnya, upaya-upaya yang dilakukan belum berhasil menghasilkan dampak yang positif.

Adapun peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis yaitu:

## Perencanaan

Perencanaan adalah proses berkelanjutan yang mencakup dua aspek utama, yaitu formulasi dan pelaksanaan (Rahma et al., 2024). Perencanaan berfungsi untuk mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, karena sifat rencana adalah sebagai panduan dalam menjalankan aktivitas tersebut (Arifudin et al., 2021). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ahmad & Pratama, (2021) Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dilakukan di masa depan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan penanganan gelandangan dan pengemis yang telah disusun oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang adalah berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pinrang yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024, dengan harapan terwujudnya masyarakat Pinrang yang sejahtera, religius, harmonis, mandiri, dan tangguh dalam mengelola potensi daerah.

Perencanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang memiliki peran penting dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana strategis yang efektif. Rencana ini tidak hanya sekadar merumuskan



langkah-langkah untuk menangani permasalahan sosial yang kompleks terkait dengan gelandangan dan pengemis, tetapi juga berfungsi sebagai panduan dalam memastikan upaya-upaya tersebut dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dalam menjalankan perencanaan tersebut, Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang melakukan pendataan terhadap para gelandangan dan pengemis. Pendataan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai jumlah, lokasi, dan kondisi sosial serta ekonomi mereka, sehingga rencana yang disusun dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya. Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan dalam menangani masalah tersebut dapat menjadi lebih terarah dan berdampak positif bagi mereka yang membutuhkan bantuan.

Pada proses pendataan, informasi terkait pengemis dan gelandangan akan terungkap, yang kemudian akan diikuti dengan tindak lanjut berupa pemberian perlindungan dan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Tujuan utama dari pendataan ini adalah untuk memastikan bahwa para gelandangan dan pengemis dapat mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan tidak mengalami diskriminasi

dari masyarakat. Dengan memahami kondisi mereka secara lebih mendalam melalui pendataan, Dinas Sosial dapat merancang program-program yang lebih tepat sasaran untuk memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui tindakan ini, diharapkan mereka dapat mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal yang layak, serta kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan mencari pekerjaan. Dengan demikian, pendataan menjadi langkah awal yang penting dalam upaya untuk memperbaiki kondisi sosial dan kesejahteraan para gelandangan dan pengemis, serta mendorong inklusi sosial dan penghapusan stigma terhadap mereka dalam masyarakat.

### Memberikan Pengarahan

Menurut Sukarna (2011), Pengarahan merupakan dorongan dan motivasi kepada individu untuk bersungguh-sungguh dan berusaha keras dalam mencapai tujuan dengan ikhlas, sejalan dengan perencanaan dan upaya pengorganisasian yang dilakukan oleh pihak pelaksana. Sedangkan menurut Kurniadi (2013), Pengarahan merupakan proses memberikan tugas, perintah, dan instruksi yang memungkinkan individu memahami keinginan pelaksana. Melalui

pengarahan ini, individu dapat berkontribusi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang telah terlibat secara aktif dalam memberikan pengarahan kepada gelandangan dan pengemis. Pendekatan ini meliputi pemberian nasehat dan bimbingan yang bertujuan untuk membantu mereka mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapi. Melalui interaksi ini, Dinas Sosial berupaya untuk memberikan arahan yang relevan serta memberikan panduan yang bermanfaat bagi gelandangan dan pengemis dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka.

Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk mencegah mereka kembali terjun ke jalanan dan membuat mereka sadar untuk mengembangkan potensi diri, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Pengarahan yang dilakukan bersifat persuasif, dengan mencoba mengajak mereka untuk memahami bahwa hidup di jalanan dan pengemis tidak hanya melanggar hukum dan norma sosial, tetapi juga membahayakan keselamatan mereka, mengingat kondisi tidak sehat di jalanan. Meskipun Dinas Sosial telah memberikan pengarahan secara kontinu, ternyata masih banyak dari gelandangan

dan pengemis yang kembali ke kehidupan jalanan.

Hal ini menjadi sinyal bahwa pendekatan yang digunakan belum sepenuhnya berhasil. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dari Dinas Sosial untuk mengevaluasi metode, materi, dan narasumber yang digunakan dalam pengarahan. Pengembangan pengarahan yang lebih efektif membutuhkan pendekatan yang lebih terarah dan komprehensif. Dinas Sosial dapat mempertimbangkan menggunakan metode yang lebih interaktif dan partisipatif, serta memilih materi yang lebih relevan dan menarik bagi target audiens. Selain itu, penting juga untuk melibatkan narasumber yang memiliki pengalaman langsung atau keahlian khusus dalam bidang ini, sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diterima oleh gelandangan dan pengemis. Dengan demikian, diharapkan upaya pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya meninggalkan kehidupan di jalanan dan mencari solusi yang lebih baik untuk masa depan mereka.

Pengembangan pengarahan yang lebih efektif membutuhkan pendekatan yang lebih terarah dan komprehensif. Dinas Sosial dapat mempertimbangkan

menggunakan metode yang lebih interaktif dan partisipatif, serta memilih materi yang lebih relevan dan menarik bagi target audiens. Selain itu, penting juga untuk melibatkan narasumber yang memiliki pengalaman langsung atau keahlian khusus dalam bidang ini, sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diterima oleh gelandangan dan pengemis. Dengan demikian, diharapkan upaya pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya meninggalkan kehidupan di jalanan dan mencari solusi yang lebih baik untuk masa depan mereka.

### **Pemberian Bimbingan**

Keterbatasan ruang dan sumber daya telah menjadi hambatan serius dalam memberikan bimbingan yang optimal kepada gelandangan dan pengemis. Dampaknya, program bimbingan yang telah dilaksanakan tidak mencapai hasil yang diharapkan. Untuk mengatasi tantangan ini, Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang telah mengambil langkah strategis dengan berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk memberikan bimbingan kerohanian kepada para gelandangan dan pengemis. Diharapkan, kolaborasi ini dapat meningkatkan keberadaan

mereka serta menciptakan kenyamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Namun, upaya tersebut masih memerlukan dukungan lebih lanjut. Pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian ekstra dengan menyediakan fasilitas yang memadai, seperti rumah singgah, sehingga Dinas Sosial memiliki tempat yang layak untuk memberikan bimbingan secara efektif. Selain itu, alokasi dana yang memadai dari pemerintah daerah sangat penting untuk membangun infrastruktur yang sesuai. Dengan adanya fasilitas yang memadai, diharapkan permasalahan gelandangan dan pengemis dapat teratasi secara menyeluruh, dan kenyamanan serta ketertiban masyarakat dapat terjaga dengan baik di Ibukota Kabupaten Pinrang.

### **Memberikan Pelatihan**

Menurut Adwi et al., (2023), pelatihan adalah rangkaian program yang disusun untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan seseorang. Efektivitas pelatihan adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah program tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelatihan adalah upaya yang direncanakan untuk membantu individu dalam memperoleh pengetahuan,

keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam pekerjaan mereka (Gustiana et al., 2022).

Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada para gelandangan dan pengemis mengacu pada Perda No. 7 Tahun 2019 yang mengatur larangan terhadap praktik mengemis serta menetapkan sanksi dan hukuman bagi pelanggar. Meskipun upaya hukum tersebut telah diterapkan, namun kenyataannya, kesadaran para gelandangan dan pengemis untuk meninggalkan kehidupan di jalanan masih belum optimal. Oleh karena itu, pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial memiliki tujuan lebih dari sekadar penegakan hukum, yakni memberikan pemahaman yang mendalam kepada mereka mengenai alternatif kehidupan yang lebih baik

Upaya yang kemudian dilakukan untuk meningkatkan peran Dinas Sosial adalah dengan memberikan pelatihan langsung kepada para gelandangan dan pengemis, yang terintegrasi dengan berbagai kegiatan lainnya. Ini termasuk kerjasama dengan lembaga lain, seperti pemberian bimbingan dan pengarahan yang melibatkan Kementerian Agama, pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan, dan penguatan karakter. Melalui pendekatan ini, diharapkan

terjadi perubahan positif dalam kondisi dan kehidupan para gelandangan dan pengemis di Ibukota Kabupaten Pinrang. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada mereka, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran akan alternatif kehidupan yang lebih baik dan memberikan mereka dukungan dalam mewujudkannya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, terlihat bahwa peran Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Ibukota Kabupaten Pinrang masih belum optimal. Meskipun telah dilakukan pemberian pelatihan kepada mereka, hasil yang diperoleh masih belum memuaskan. Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial seharusnya tidak hanya memberikan arahan agar para gelandangan dan pengemis tidak lagi turun ke jalanan dan mengganggu masyarakat. Sebaliknya, pelatihan harus mencakup aspek-aspek yang lebih mendalam, seperti pembangunan keterampilan, peningkatan kesadaran, dan memberikan pemahaman akan alternatif kehidupan yang lebih baik.

Dalam praktiknya, terlihat bahwa gelandangan dan pengemis masih terus berada di jalanan dan melanjutkan

kegiatan meminta-minta kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang belum mampu memberikan efek yang signifikan dalam mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di Ibukota Kabupaten Pinrang. Dalam konteks ini, perlu peran pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada Dinas Sosial, seperti rumah singgah, agar pemberian pelatihan dapat dilakukan secara optimal. Rumah singgah memberikan lebih dari sekadar tempat perlindungan fisik. Mereka bisa menjadi pusat untuk melanjutkan proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan yang telah dimulai melalui pelatihan. Di rumah singgah, gelandangan dan pengemis dapat diberikan bimbingan yang lebih intensif dan berkelanjutan, serta kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan yang mereka pelajari. Selain itu, rumah singgah juga dapat memberikan lingkungan yang lebih stabil dan aman bagi mereka untuk mengubah pola hidup mereka secara bertahap.

## KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan dan hasil pembahasan dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang dan Satpol

PP dalam perannya mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis adalah dengan merancang rencana penanganan gelandangan dan gepeng berdasarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dalam RPJMD 2019-2024, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera, religius, harmonis, mandiri, dan tangguh.

Pengarahan diberikan kepada gelandangan dan gepeng untuk tidak hidup secara mengemis dan menggelandang. Melalui bimbingan sesuai prosedur, mereka didorong untuk meninggalkan gaya hidup tersebut dan mengembangkan pola hidup yang lebih baik. Kerjasama dengan Kementerian Agama diperlukan untuk meningkatkan efektivitas bimbingan. Meskipun pelatihan belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan fasilitas, penyuluhan sosial secara langsung dilakukan dengan melibatkan kolaborasi dengan lembaga lain.

Adapun keterbatasan penelitian ini ialah hanya berfokus terhadap instansi atau lembaga pemerintah dalam menangani masalah penanganan gelandangan dan pengemis. Sehingga kami merekomendasikan agar penelitian yang akan datang dapat mengkaji peran sektor swasta dalam mengurangi masalah kesenjangan sosial termasuk

penanganan pengemis dan gelandangan di Indonesia.

## REFERENSI

- Adwi, A., Pratama, M. F., Mulyadi, D. Z., Paluala, K., & Efendi, K. (2023). Pelatihan Keterampilan Soft Skills dan Kepemimpinan untuk Peningkatan Produktivitas Kerja UMKM di Kota Kendari. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), pp. 13756–13762.
- Ahmad, R., & Pratama, A. (2021). Faktor Manajemen Profesional: Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pengendalian (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), pp. 699–709.
- Arifudin, M., Sholeha, F. Z., & Umami, L. F. (2021). Planning (Perencanaan) Dalam Manajemen Pendidikan Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(02), pp. 162–183.
- Azrin, A. A., & Bukido, R. (2020). Poverty and Religiosity: The 'Missing Link' from Islamic Perspective. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. repository.iain-manado.ac.id.  
[http://repository.iain-manado.ac.id/253/2/Simi\\_Poverty.pdf](http://repository.iain-manado.ac.id/253/2/Simi_Poverty.pdf)
- Bradshaw, J., & Nieuwenhuis, R. (2021). Poverty and The Family in Europe. In *Research Handbook on the Sociology of the Family* (pp. 400–416). Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
- Dasic, B., Devic, Z., Denic, N., Zlatkovic, D., Ilic, I. D., Cao, Y., Jermsttiparsert, K., & Le, H. Van. (2020). Human Development Index in A Context of Human Development: Review on The Western Balkans Countries. *Brain and Behavior*, 10(9), e01755.
- Gustiana, R., Hidayat, T., & Fauzi, A. (2022). Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Suatu Kajian Literatur Review Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(6), pp. 657–666.
- Hahury, H. D., Louhanapessy, F. H., & Rumalolas, A. (2022). The Poor's Coping Strategies in Overcoming Water Scarcity in Small Island, Eastern Seram Regency, Maluku. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(1), pp. 44-57.
- Hamidah, S. N. (2019). Penanggulangan Gelandangan Pengemis (GePeng) di Kota Serang Banten dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *Lembaran Masyarakat*, 5(1), pp. 55–76.
- Juarez, M. S. (2020). Social Rights and the Welfare State: A Necessary Relation. *Cardozo Int'l & Comp. L. Rev.*, 4, p. 539.
- Khan, N., & Fahad, S. (2020). Begging Negative Impact on the World Community. *SSRN Electronic Journal*.  
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3530070>
- Kurniawan, I. G. A. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), pp. 282–298.
- M. Ramadhani, Sarbaini, H. M. (2016). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11), pp. 947–954.
- Morris, M. H., Santos, S. C., & Neumeyer, X. (2020). Entrepreneurship as a solution to poverty in developed economies. *Business Horizons*, 63(3), pp.

- 377–390.
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Padang. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), pp. 67–83.
- Patton, M. Q. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahadi, A., Al Musadieq, M., & Susilo, H. (2014). Analisis dan Desain Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Komputer (Studi Kasus pada Toko Arta Boga). In *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 8(2).
- Rahardjo, M. (2011) *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*. Disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (Unpublished)
- Rahma, D. W. A., Cahyarani, D. M., Nugroho, G. V. P., Ikaningtyas, M., & Hidayat, R. (2024). Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis Pembangunan Berkelanjutan. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), pp. 186–197.
- Ruggeri, K., Garcia-Garzon, E., Maguire, Á., Matz, S., & Huppert, F. A. (2020). Well-being is more than happiness and life satisfaction: a multidimensional analysis of 21 countries. *Health and Quality of Life Outcomes*, 18, pp. 1–16.
- Rusliadi, R., Lestari, D., Amiruddin, I., & Puspita, D. P. (2024). Dynamics of Governance and Private Partnership in Social Programme Implementation: A Comparative Study-Regency of Sinjai, Takalar and Bantaeng in Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(1), pp. 92–106.
- Singh, P. K., & Chudasama, H. (2020). Evaluating Poverty Alleviation Strategies in A Developing Country. *PLOS ONE*, 15(1), e0227176. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227176>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Therborn, G. (2020). Welfare States and Capitalist Markets. In *Welfare Law* (pp. 93–110). Oxfordshire: Routledge.
- Wahyuni, H., Suswanta, S., & Prastya, D. E. (2021). Social Service and Community Social Worker Program for Empowerment Homeless and Beggars in Yogyakarta. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 5(2), pp. 230–240. <https://doi.org/10.19109/jssp.v5i2.6833>
- Zamharira, C., & Arantika, D. P. (2018). Peran Dinas Sosial dalam menanggulangi Pengemis di Kota Banda Aceh. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 4(1), pp. 115–128.